

**SEKOLAH KEPEMIMPINAN PEREMPUAN LSM YSKK : GERAKAN
SOSIOKULTURAL KEWARGANEGARAAN UNTUK PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DALAM POLITIK DESA DI GUNUNG KIDUL**

An-nisa Nur Sholihah Indah Septiani
PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
annisansis@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan Sekolah Kepemimpinan Perempuan (SKP) yang diselenggarakan oleh LSM YSKK sebagai salah satu gerakan sosiokultural kewarganegaraan untuk pemberdayaan perempuan dalam politik desa di Kabupaten Gunung Kidul. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan SKP, menganalisis SKP sebagai salah satu gerakan sosiokultural kewarganegaraan, dan mengetahui peran SKP untuk memberdayakan perempuan dalam politik desa di Gunung Kidul. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, sekolah kepemimpinan perempuan LSM YSKK dilaksanakan dalam tiga tahap yakni kelas pembekalan, kelas pendalaman dan kelas pemantapan yang diikuti oleh perempuan desa di Kabupaten Gunung Kidul; kedua, SKP LSM YSKK merupakan salah satu wujud pendidikan kewarganegaraan di masyarakat dalam bentuk gerakan sosiokultural kewarganegaraan; dan ketiga, SKP berperan untuk memberdayakan perempuan dalam politik desa di Kabupaten Gunung Kidul. SKP berdampak positif pada perubahan pola pikir perempuan desa terkait kesetaraan hak untuk terlibat dalam politik desa dan pentingnya keterlibatan mereka dalam politik desa. Program sejenis perlu dilaksanakan diberbagai daerah lain di Indonesia untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik desa dan kepentingan perempuan dapat teradopsi dalam berbagai kebijakan desa.

Kata kunci : *sekolah kepemimpinan perempuan, gerakan sosiokultural kewarganegaraan*

PENDAHULUAN

Laki-laki dan perempuan secara biologis dipandang sederajat, namun secara sosial keduanya sering memperoleh perlakuan yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang membangun posisi peran laki-laki dan perempuan yang tidak setara. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, budaya patriarkhi telah mengakar kuat dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak pernah dipermasalahkan. Budaya patriarkhi juga seringkali dikaitkan dengan kodrat yang tak terbantahkan.

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Terkait dengan budaya patriarkhi, Billing dan Alvesson dalam Partini (2013:14) mengatakan, “... *patriarchy as the law of the father and the operation of this law on other individuals. This definition does not limit the concept to the family but includes all male authority as an expression of symbolic ‘father’*”. Hukum ayah yang dimaksud tersebut tidak hanya dalam lingkup keluarga melainkan juga dalam seluruh segi kehidupan dimana kaum laki-laki secara umum memiliki otoritas yang lebih tinggi dari perempuan, baik dalam hal sosial, politik, ekonomi maupun pekerjaan. Sebagaimana di Indonesia dimana pada bidang-bidang tertentu perempuan masih memperoleh perlakuan yang berbeda dari laki-laki. Padahal Indonesia sendiri telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur tentang persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki dala Sebagaimana diungkapkan Iriani (2017) bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut meratifikasi konsensus pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan serta memberikan perlindungan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kehidupan, yang diselenggarakan *World Conference International Year of Women-PBB di Mexico City*.

Terkait dengan kedudukan perempuan dalam politik desa, dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa pengelolaan pembangunan desa harus melibatkan seluruh komponen desa tidak terkecuali perempuan yang menjadi salah satu elemen kunci dalam tata pembangunan pada umumnya. Dalam Pasal 58 ayat (1) juga menyatakan “Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.” Sehingga dapat disimpulkan Undang-undang Desa telah mengakomodasi partisipasi perempuan dalam kegiatan politik maupun pemerintahan desa.

Berbanding terbalik dengan regulasi tersebut. data dari para praktisi pembangunan dan aktivis gerakan sosial perempuan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam perolehan tanggung jawab akses dan penguasaan terhadap Sumber Daya Alam serta dalam pengambilan

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

keputusan dalam keluarga komunitas, pemerintahan dan di tingkat nasional. (Bintuni dalam Iriani, 2017). Data tersebut sebagaimana fakta dalam berbagai hal di kehidupan kita, dimana laki-laki seringkali jauh lebih dominan dibanding perempuan, termasuk dalam pemerintahan. Perempuan seringkali dianggap tabu dan kurang pantas untuk menjadi pemimpin, atau duduk di pemerintahan. Hal ini khususnya terjadi di pedesaan-pedesaan. Berbeda dengan perempuan kota yang telah lebih tereduksi dan telah memahami kesetaraan gender, para perempuan kota barangkali telah banyak yang menjadi wakil dan terlibat dalam pemerintahan setempat mereka tinggal. Sedangkan di pedesaan masih jarang sekali ditemui perempuan yang menjadi bagian dalam struktur pemerintahan desa, atau setidaknya ikut aktif dalam kegiatan pemerintahan desa maupun pengambilan keputusan dalam politik desa. Sebagian besar struktur pemerintahan desa diisi oleh laki-laki, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, maupun perangkat desa lainnya, bahkan ketua RW, ketua RT seluruhnya adalah laki-laki. Selain kurangnya pemberian akses kepada perempuan, dari sisi perempuan sendiri merasa tidak perlu untuk melibatkan diri mereka dalam berbagai kegiatan pemerintahan desa maupun pengambilan keputusan, seperti rapat, musyawarah, dan sebagainya. Keterlibatan perempuan masih sebatas keikutsertaan dalam PKK, Dasa Wisma, dan Pengajian, yang faktanya tidak memberikan banyak berkontribusi dalam pembangunan desa, karena mayoritas hanya diisi dengan kegiatan keuangan dan keagamaan.

Hal ini salah satunya disebabkan kurangnya sosialisasi dan tidak adanya akses bagi perempuan desa untuk memperoleh pendidikan politik sebagai bekal untuk terjun dalam pemerintahan desa maupun untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di desa. Bahkan banyak dari mereka yang belum menyadari akan hak mereka untuk dapat terlibat dalam politik dan pembangunan desa. Sebagaimana diungkapkan salah satu tim YSKK Lusiningtyas (2018) dalam wawancara bahwa ironi ketika banyak lembaga yang kemudian menyuarakan pentingnya kuota/keterwakilan perempuan dalam pembangunan namun tidak ada upaya untuk mematangkan SDM perempuan dalam berkiprah di pembangunan, dan YSKK

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

mencoba mengisi ruang kosong tersebut. Ruang kosong yang dimaksimalkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik dan pembangunan desa.

Agenda pemberdayaan perempuan dalam politik desa yang diselenggarakan oleh LSM YSKK ini merupakan salah satu wujud pendidikan politik yang merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan di masyarakat yang selama ini memang masih sangat kurang dilaksanakan, dimana pendidikan kewarganegaraan didominasi dengan pkn persekolahan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan : 1) Bagaimana pelaksanaan sekolah kepemimpinan perempuan LSM YSKK? 2) Bagaimana peran sekolah kepemimpinan perempuan LSM YSKK sebagai gerakan sosiokultural kewarganegaraan dalam memberdayakan perempuan dalam politik desa?

Tujuan penelitian ini yakni : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan sekolah kepemimpinan perempuan LSM YSKK, 2) Untuk mengetahui peran sekolah kepemimpinan perempuan LSM YSKK sebagai gerakan sosiokultural kewarganegaraan dalam memberdayakan perempuan dalam politik desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan anggota LSM YSKK dan studi dokumen dilakukan dengan menganalisis laporan tahunan kegiatan LSM YSKK yang terkait dengan pelaksanaan program Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK dan berbagai dokumen lain.

Subyek penelitian yakni anggota LSM YSKK yang terlibat sebagai pelaksana kegiatan Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK. Variabel yang diteliti yakni Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK sebagai gerakan sosiokultural kewarganegaraan dan peran Sekolah Kepemimpinan Perempuan YSKK untuk pemberdayaan perempuan dalam politik desa di gunung kidul. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK

Sekolah Kepemimpinan Perempuan yang diselenggarakan LSM YSKK pada awalnya merupakan forum yang beranggotakan para perempuan yang telah tergabung dalam pemerintahan desa, yakni berprofesi sebagai BPD dan perangkat desa. Forum ini bernama “Forum Srikandi Desa” dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan para anggotanya tersebut dalam tugas pemerintahan desa. Forum ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan mengenai pengarus utamaan gender dalam pembangunan desa. Forum ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan dari para perempuan yang telah terjun dalam pemerintahan desa akan forum untuk mengembangkan kemampuan mereka, karena faktanya para perempuan yang menjabat di pemerintahan desa pada saat itu belum memperoleh dan tidak memiliki pengetahuan mengenai tugas dan peran mereka di pemerintahan desa. Ketika mereka dilantik langsung diminta untuk bekerja, tanpa adanya pelatihan apapun, sehingga berdampak pada seringnya terjadi kesalahan, ketidakpahaman, serta dianggap kurang oleh masyarakat. Dalam wawancara mereka mengatakan bahwa walaupun ada bimtek, biasanya yang diundang hanya kepala bagian (kabag) dimana mayoritas adalah laki-laki dan tidak disosialisasikan. Sehingga pekerja perempuan tidak memiliki akses untuk mengembangkan diri mereka.

Forum Srikandi Desa tersebut kemudian dikembangkan menjadi Sekolah Kepemimpinan Perempuan, dimana pesertanya tidak lagi hanya berasal dari perempuan yang telah memangku jabatan di pemerintahan desa, melainkan juga para perempuan desa yang telah diberikan pengarahan mengenai pengarus utamaan gender dan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa juga diarahkan untuk mengikuti SKP dengan harapan mereka akan dapat ikut terjun dalam pemerintahan desa dan memiliki kemampuan untuk hal tersebut.

Sejak inisiasinya pada tahun 2014, SKP telah dilaksanakan 4 angkatan, dimana masing-masing angkatan dilaksanakan selama kurang lebih 5 bulan yang dibagi dalam 10 pertemuan dan masing-masing pertemuan dilaksanakan setiap 2

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

minggu sekali. Peserta SKP berjumlah kurang lebih 140-150 perempuan yang terdiri dari perempuan perangkat desa dan perempuan kader PKK yang disiapkan untuk dapat terjun menjadi perangkat desa selanjutnya. Para peserta berasal dari 20 desa di Kabupaten Gunung Kidul, yakni Desa Semin, Candirejo, Karang Sari, Sambirejo, Sumberejo, Kalitekuk, Rejosari, Kemejing, Watusigar, Kampung, Beji, Jatiayu, Karangmojo, Ngawis, Natah, Sidoharjo, Tepus, Kemadang, dan Kemiri.

SKP dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yakni kelas pembekalan, kelas pendalaman, dan kelas pemantapan/konsultatif. Kelas pembekalan bertujuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan-pengetahuan mendasar terkait dengan keterlibatan mereka dalam politik dan pemerintahan desa. Materi dasar yang diberikan dalam SKP kelas pembekalan antara lain : Bentuk dan Sistem Demokrasi Desa, Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik, Peluang dan Tantangan Perempuan dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014, Perencanaan dan Penganggaran berperspektif Gender, Strategi Memobilisir Dukungan dan Kepemimpinan. SKP dilaksanakan dengan metode Appreciative Inquiry, berupaya untuk melihat sisi positif dan kekuatan yang dimiliki perempuan untuk membangun harapan dalam diri mereka terkait keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan desa.

Kelas pendalaman lebih menekankan pada pendalaman materi tertentu yang memang dibutuhkan oleh para peserta SKP, yang pada saat kelas pembekalan baru diberikan materi dasarnya saja. Kelas ini diawali dengan penyampaian pengalaman para peserta SKP terkait apa yang telah mereka ketahui dan lakukan pasca kelas pembekalan, misalnya mereka telah berani berbicara di depan umum, dan sikap mereka untuk peduli dengan desanya melalui keinginan untuk terlibat dalam pembangunan desa. Dalam kelas pendalaman juga menggali apa saja pengalaman keterlibatan peserta dalam perencanaan dan penganggaran desa, sebagai keberlanjutan dari materi Penganggaran Desa yang Responsif Gender yang telah diberikan pada kelas pembekalan. Hal ini dilakukan karena hampir 90% peserta seringkali belum pernah terlibat sama sekali dalam

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

perencanaan dan penganggaran di desa. Dalam kelas ini peserta juga diminta untuk menggali isu-isu strategis terkait dengan perempuan yang menjadi persoalan, dimana dari kegiatan ini mereka dilatih dan diarahkan untuk dapat mengenali, menganalisis dan menyuarkan isu-isu terkait dengan perempuan atau yang kurang berpihak pada perempuan untuk dapat diakomodir dalam kebijakan desa dan bisa dicarikan solusinya, sehingga kepentingan perempuan akan dapat teradopsi. Selain itu, pada kelas ini peserta juga diarahkan untuk mereview Rencana Kegiatan Pemerintah Desa dan Rencana Anggaran Pemerintah Desa (yang telah dibuat oleh pemerintah desa) apakah telah berperspektif gender atau belum.

Kelas terakhir yakni kelas pemantapan yakni untuk memantapkan peserta untuk terjun dalam pemerintahan desa, yakni meliputi syarat-syarat dan tata cara yang perlu mereka lakukan untuk ikut serta dalam pemerintahan desa, yakni meliputi tata cara pendaftaran perangkat desa, cara memperoleh atau mencari dukungan, dan beberapa hal atau materi lain yang diperlukan peserta, sehingga kelas ini lebih bersifat konsultatif.

Pengajar atau narasumber pada SKP ini berasal dari anggota LSM YSKK sendiri, khususnya yang tergabung dalam Divisi Pemberdayaan Perempuan. Selain itu, YSKK juga mengundang narasumber tamu atau narasumber ahli yang berkompeten dalam hal terkait. Sebagai contoh, dalam salah satu angkatan SKP, narasumber ahli didatangkan dari SKPD terkait dengan pemberdayaan dan pemerintahan desa, yakni Bappeda dan Setda Pemerintahan Desa Kabupaten Gunung Kidul. Selain itu, YSKK juga mengundang Bupati Gunung Kidul sebagai Keynote Speace.

Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK sebagai Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas atau yang disebut dengan *citizenship education* tidak hanya meliputi pendidikan kewarganegaraan di

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

persekolahan, melainkan juga pendidikan kewarganegaraan di masyarakat. Sebagaimana dikatakan Winarno (2013:4-5), “*citizenship education* mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal pendidikan kewarganegaraan, tetapi bentuk-bentuk informal dan non formal pendidikan kewarganegaraan.” Pendidikan kewarganegaraan di sekolah formal telah dilaksanakan di Indonesia mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan di luar sekolah masih kurang diperhatikan dan belum dilaksanakan sepenuhnya. Winarno mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan di luar sekolah dapat berupa penataran atau program lain yang sengaja dirancang yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara yang cerdas dan baik (Winarno, 2013:5). Sekolah Kepemimpinan Perempuan yang dilakukan YSKK ini merupakan salah satu bentuk informal dari pendidikan kewarganegaraan atau merupakan bentuk pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di masyarakat, yang lebih khusus dilaksanakan dalam wujud pendidikan politik bagi perempuan desa di Kabupaten Gunung Kidul. Sehingga jika dikaitkan dengan domain pendidikan kewarganegaraan, maka SKP YSKK merupakan salah satu pelaksanaan dari domain PKN yakni domain sosial-kultural atau pkn kemasyarakatan.

Winarno (2013:7-8) mengatakan bahwa secara paradigmatis pendidikan kewarganegaraan memiliki tiga komponen atau domain, yakni domain kajian ilmiah, domain kurikuler dan domain sosial-kultural. Domain sosial-kultural ini juga sering disebut dengan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan (pkn kemasyarakatan). Pkn kemasyarakatan mencakup beberapa kajian seperti *civil society*, *civic literacy*, dan *civic engagement* (gerakan sosiokultural kewarganegaraan). Program Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK merupakan salah satu wujud dari *Civic engagement* atau gerakan sosiokultural kewarganegaraan, dimana SKP bertujuan untuk menggerakkan para perempuan desa untuk dapat terlibat dalam politik dan pemerintahan desa yang selanjutnya berkontribusi dalam pembangunan desa.

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Sebagai salah satu negara demokrasi, dimana keterlibatan setiap elemen warga negara merupakan hal yang *urgent* dalam pemerintahan, maka penting untuk mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik desa, baik dalam pemerintahan desa maupun dalam setiap proses pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pembangunan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk teradopsinya kepentingan perempuan dalam kebijakan desa serta menjamin keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa, sehingga selanjutnya juga berdampak pada terbangunnya demokrasi desa yang baik, mengingat desa merupakan instansi pemerintah terbawah. Dimulai dari demokrasi yang baik di tingkat desa diharapkan akan terbangun demokrasi nasional yang baik pula. Sebagaimana disampaikan Supadmi bahwa desa memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama dalam penguatan pondasi demokrasi, karena sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari desa sehingga pembangunan demokrasi salah satunya berangkat dari demokrasi desa (Supadmi, 2013). Dengan adanya pelatihan kepemimpinan perempuan ini demokrasi yang dijalankan oleh berbagai pihak aparatur pemerintahan yang benar-benar berkualitas, mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tidak sekedar mengejar aspek ekonomi melalui jabatan pemerintahan.

Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi dikatakan sebagai pemerintahan yang baik. Terkait dengan hal ini Rusnaini (2016) mengatakan bahwa *“Governance is the decision making process and the process of how the decision is implemented or not implemented at various levels of government.”* Pemerintahan adalah proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan itu diterapkan atau tidak diimplementasikan di berbagai tingkat pemerintahan. Proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan demokrasi mensyaratkan keterlibatan seluruh elemen warga negara, tidak hanya laki-laki melainkan juga perempuan. Karena selain itu, demokrasi juga mensyaratkan kesetaraan, termasuk kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana disampaikan dalam salah

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

satu forum oleh direktur YSKK, bahwa saat ini tidak lagi menjadi hal yang utama bagi para perempuan untuk mengejar kuota keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, namun yang terpenting saat ini adalah bagaimana perempuan dapat selain dapat menduduki posisi strategis dalam pemerintahan desa, juga bagaimana agar perempuan benar-benar tercetak sebagai figure aparatur pemerintah desa yang menguasai tanggung jawab dan kewajibannya (www.yskk.org).

Peran Sekolah Kepemimpinan Perempuan LSM YSKK untuk Memberdayakan Perempuan dalam Politik Desa

Berbagai peraturan perundangan di Indonesia telah menjamin kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terkait hak mereka untuk terlibat dalam pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Namun pada kenyataannya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa masih sangat sedikit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti budaya patriarki yang telah mengakar kuat, tingkat pendidikan perempuan yang relatif rendah, belum adanya kesadaran dari perempuan akan pentingnya keterlibatan mereka dalam pemerintah desa serta belum adanya akses bagi perempuan desa untuk mendapat pengetahuan politik sebagai bekal untuk terlibat dalam pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa secara umum ada dua persoalan, yakni kultur dan kesalahan pemahaman agama, yang merupakan faktor klasik keterbelakangan perempuan dalam segala kehidupan kemasyarakatan. Perempuan Indonesia seakan enggan untuk merebut jabatan-jabatan politik yang dalam prosedurnya harus bersaing secara ekuivalen dengan laki-laki. Masalah kesetaraan dan kadiln gender di Indonesia dalam bidang politik masih menjadi kendala utama partisipasi politik (Utami, 2001:5).

Berangkat dari kondisi tersebut LSM YSKK kemudian menghadirkan wadah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan politik bagi para perempuan desa dan memberdayakan mereka untuk dapat terlibat dalam politik serta pemerintahan desa, yang diwujudkan dengan diinisiasinya Sekolah Kepemimpinan Perempuan yang dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul.

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Sejak inisiasinya pada tahun 2014 dan telah meluluskan empat angkatan, faktanya SKP telah menumbuhkan kesadaran pada perempuan desa mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam pemerintahan desa serta telah memberikan berbagai pengetahuan yang mendorong terciptanya kader-kader perempuan yang berkualitas untuk terjun di pemerintahan desa. Sebagai contoh, salah satu alumni SKP, Bu Pur mengatakan, “Saya senang aktif di desa karena banyak ilmu yang didapat. Perempuan seperti saya ini sulit untuk memperoleh kesempatan mendapatkan pengetahuan, jadi harus pintar-pintar mencari kesempatan. Banyak yang saya dapatkan ketika ikut dengan YSKK, karena kalau hanya berharap dari kegiatan di desa seperti pertemuan PKK desa, hanya itu – itu saja yang dibahas.”

Setelah mengikuti berbagai program yang diadakan, termasuk pertemuan Konsolidasi PKK, para perempuan juga menjadi paham posisinya yang seharusnya dalam politik, pemerintahan, dan pembangunan desa. Mereka sangat sepakat jika perempuan itu harus duduk juga dalam pemerintahan desa, supaya kita bisa ikut ambil kebijakan, dan juga bisa dikawal usulan-usulan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa program penguatan kepemimpinan perempuan ini berhasil dalam merubah pola pikir masyarakat mengenai kedudukan perempuan dalam pemerintahan.

Hasil dari pembinaan YSKK terhadap perempuan ini juga meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan politik desa. Contohnya yaitu jika sebelumnya, dalam musrenbangdes yang dilibatkan hanya bapak-bapak, sekarang PKK yang beranggotakan ibu-ibu juga dilibatkan. Para ibu-ibu tersebut juga tidak hanya pasif, tetapi banyak yang berani mengungkapkan ide-ide dan menyuarakan kebutuhan mereka dalam musyawarah yang akan menghasilkan rencana pengembangan desa mereka tersebut. Keterlibatan perempuan dalam musyawarah tersebut sebagaimana dimuat dalam artikel pada www.yskk.org yang menyatakan bahwa, dalam Musdes tersebut banyak elemen masyarakat yang dilibatkan. Pelibatan masyarakat ini dilakukan sebagai wujud partisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan Desa Kalitekuk yang akan dilaksanakan di tahun 2018 yang akan datang. Berbagai elemen masyarakat yang dilibatkan dalam musdes

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

diantaranya adalah perwakilan dari karang taruna, tokoh masyarakat dan tokoh agama, perangkat desa, BPD, organisasi kemasyarakatan (KWT, Gapoktan, dan PKK). Pelibatan perempuan dalam forum yang sangat strategis di level desa ini lebih dititik beratkan pada unsur PKK. Hal ini dikarenakan kader PKK sudah mencakup pada beberapa aspek sesuai dengan pokja yang ada di tubuh kelembagaan PKK serta mencakup kewilayahan di yakni di semua padukuhan yang ada di Desa tersebut.

Para perempuan juga telah dapat mengamalkan ilmu yang didapat dalam SKP, sebagai contoh yakni mereka telah mampu mengevaluasi atau mereview perencanaan pembangunan desa mereka, yakni bahwa Musyawarah Pembangunan Desa selama ini kurang mengakomodir kebutuhan perempuan dan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan secara konkret. Hal tersebut dilihat dari minimnya program-program pelatihan bagi perempuan, baik program yang berdimensi peningkatan kapasitas SDM dibidang politik-pemerintahan, maupun yang berdimensi pemberdayaan ekonomi bagi perempuan. Sehingga mereka kemudian berkeinginan untuk dapat terlibat dalam musyawarah maupun proses pengambilan keputusan desa lainnya.

Selain keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, SKP YSKK juga telah berperan dalam meningkatkan jumlah perempuan yang akan terlibat dalam pemerintahan desa, bahkan beberapa diantaranya telah ikut serta mencalonkan diri menjadi kepala desa meskipun sebagian besar masih belum berhasil dan kalah dengan calon kepala desa laki-laki. Para perempuan yang mencalonkan diri menjadi kepala desa masih mengalami kesulitan dalam mencari dukungan dari masyarakat. Hal ini salah satunya disebabkan karena masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa jabatan pemimpin seperti kepala desa lebih layak dan pantas ditempati oleh laki-laki daripada perempuan. Sebagaimana dikatakan Partini (2013:18) bahwa ketidaksetaraan gender dapat berlangsung di dalam masyarakat karena didukung oleh sistem kepercayaan gender (*gender belief system*). Sistem kepercayaan gender ini didasarkan pada sejumlah kepercayaan dan pendapat tentang laki-laki yang maskulin, dan perempuan yang feminin.

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

Sistem ini mencakup sikap terhadap peran dan perilaku yang baku dan sesuai bagi laki-laki dan perempuan. Sistem tersebut menciptakan pandangan dalam masyarakat mengenai bagaimana seharusnya laki-laki dan bagaimana seharusnya perempuan, dimana lebih menjurus pada pendapat bahwa pekerjaan memimpin dan pemerintahan lebih untuk laki-laki dan perempuan lebih kepada pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lain seperti menjahit, berdagang dan sebagainya. Pola baku inilah yang akhirnya membentuk suatu stereotip, suatu pengkotak-kotakan peran laki-laki dan perempuan termasuk dalam hal pekerjaan.

Sedangkan dari sisi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, melalui Bupati Gunung Kidul, Ibu Badingsih sebagaimana dikutip dalam www.yskk.org sangat mengapresiasi dan mendukung program penguatan perempuan dalam pembangunan desa-desa di Gunung Kidul. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah Gunung Kidul berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia perempuan agar mampu menjadi mitra sejajar bagi laki-laki dalam pembangunan, untuk itu para perempuan harus membangun tekad yang kuat untuk maju dengan cara totalitas untuk berkiprah di berbagai organisasi dan masyarakat. Program YSKK ini juga telah mendorong terinisiasinya perncanaan penyusunan Perda mengenai kedudukan perempuan dalam pemerintahan, yang diharapkan akan semakin membuka kapasitas perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan desa. Di dalam rancangan Perda tersebut mengandung ketentuan untuk memprioritaskan program peningkatan sumber daya manusia perempuan, dalam hal ini peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan dalam kebijakan strategis di wilayahnya masing-masing.

Partisipasi perempuan sebagai warga negara ini diharapkan akan mendukung sistem demokrasi di Indonesia. Sebagaimana dikatakan Rusnaini (2016), *“Many theories stating that citizen participation has a positive effect on the quality of democracy. Citizen participation is usually considered as a valuable element of democratic citizenship and democratic decision making.”* Bahwa telah banyak teori yang menyatakan partisipasi warga memiliki efek positif pada kualitas demokrasi. Partisipasi warga juga dianggap sebagai elemen berharga dari

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

kewarganegaraan demokratis dan pengambilan keputusan yang demokratis. Karena dengan adanya partisipasi warga maka pemerintahan maupun kebijakan yang dihasilkan bisa berdampak positif bagi warga negara (rakyat) sendiri. Sehingga esensi demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bisa benar-benar terlaksana secara efektif.

KESIMPULAN

Sekolah Kepemimpinan Perempuan yang diselenggarakan YSKK bertujuan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan dari perempuan yang telah terlibat dalam pemerintahan desa dan meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat dalam pemerintahan desa serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan politik atau proses pengambilan keputusan di desa. SKP diikuti oleh para perempuan dari 20 desa di Kabupaten Gunung Kidul. SKP dilaksanakan dalam beberapa kegiatan yang meliputi kelas pembekalan, kelas pendalaman dan kelas pematapan. Pengajar atau narasumber dari SKP yakni dari anggota YSKK khususnya yang tergabung dalam divisi Pemberdayaan Perempuan dan narasumber ahli yang didatangkan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul khususnya yang terkait dengan pemberdayaan dan pemerintahan desa.

SKP LSM YSKK merupakan salah satu wujud pendidikan kewarganegaraan nonformal di masyarakat yakni dalam bentuk gerakan sosiokultural kewarganegaraan (*civic engagement*) yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran perempuan akan pentingnya keterlibatan mereka dalam politik desa dan mengarahkan mereka untuk ikut terlibat dalam pemerintahan desa serta proses pengambilan keputusan di desa. Sehingga selanjutnya SKP LSM YSKK juga berkontribusi terhadap pembangunan demokrasi desa.

Saran yang dapat disampaikan yaitu agar pemerintah kabupaten Gunung Kidul segera mendahkan raperda mengenai kedudukan perempuan dalam pemerintahan. Sehingga akan memperkuat regulasi mengenai keterlibatan perempuan dalam pemerintah desa maupun daerah.

Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018
“Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan
dan Kemasyarakatan”
Laboratorium PPKn FKIP UNS, 7 Juli 2018

DAFTAR PUSTAKA

- Iriani, Yuyun Agus. 2017. *Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa : UU No.6/2014 Peluang dan Tantangan*. Diakses dari www.csws.fisip.unair.ac.id Tanggal 27 September 2017.
- Partini. 2013. *Bias Gender dalam Birokrasi*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Rusnaini. 2016. Citizen Participation in Medium-Term Local Development Plan in Indonesia. *1st Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship*. Bandung.
- Supadmi, Amy. 2013. *SKP, Upaya Memperkuat Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Politik Lokal*. Diakses dari www.yskk.org 29 Juni 2018.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Utami, Tari Siwi. 2001. *Perempuan Politik di Parlemen : Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*. Yogyakarta : Gama Media
- Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta : Bumi Aksara